

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hubungan Internasional atau Hubungan antar bangsa terbentuk dari seluruh penduduk dunia yang berasal dari komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Pada dasarnya tujuan utama dari studi HI adalah mempelajari pelaku Internasional, yaitu para aktor, negara (*State Actor*), maupun non-negara (*Non-State Actor*), di dalam arena Internasional (Triwahyuni dalam Andrias dkk, 2015:41).

Sistem Internasional terbentuk dari interaksi negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama atau kebalikannya yaitu, berperang. Bentuk interaksi negara-negara di wadah dalam Politik Internasional, dimana Politik Internasional menjadi suatu wadah dari bertemunya Politik Luar Negeri masing-masing negara itu sendiri untuk melangsungkan Diplomasi dan Negosiasi sesuai dari arah kebijakan masing-masing. Dibalik interaksi antar negara selalu ada *director* entah itu individu, LSM, ataupun pemerintah di negara yang berdaulat. Interaksi negara-negara dimulai dari bagaimana Politik Luar Negeri itu dirumuskan, tujuannya untuk mengamankan kepentingan nasional yang dimana setiap negara selalu memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda.

Faktor Individu seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap perumusan PLN sebuah negara. Faktor individu ini bisa diartikan juga dengan faktor idiosinkratik/persepsi elit. Dalam studi Hubungan Internasional terdapat *level of analysis* individu, masyarakat, negara, dan sistem internasional. Faktor ini merupakan faktor paling dasar dalam *level of analysis*, akan tetapi faktor individu ini menjadi dasar dalam level yang lebih besar. Faktor idiosinkratik sangat

berdampak banyak terhadap perumusan kebijakan, akan tetapi tidak sepenuhnya dampaknya itu berlaku, karena bila dampaknya itu keseluruhan dalam perumusan akan menjadi otoritarianisme. Faktor Idiosinkratik menjadi dorongan untuk arah kebijakan dalam pentas Politik Internasional.

Menurut Yanyan Mochamad Yani pada bukunya *Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan Praksis*, menyebutkan bahwa Politik luar negeri pada hakikatnya merupakan suatu "*action theory*", yakni kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu, lazimnya disebut sebagai kepentingan nasional. Kepentingan nasional berada pada tataran multi aspek, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Secara umum, pengertian politik luar negeri merupakan suatu perangkat dengan formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, serta memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan politik internasional.

Rodrigo Duterte lahir pada 28 Maret 1945, di Maasin, Leyte Selatan, Filipina. Putra seorang gubernur daerah, ia lulus dari sekolah hukum pada tahun 1972 dan bergabung dengan Kantor Kejaksaan Kota Davao City. Ayahnya, Vicente, menjabat sebagai walikota dan Gubernur lokal, dan ibunya, Soledad, adalah seorang guru dan aktivis komunitas.

Saat masa mudanya, Duterte dua kali dikeluarkan dari sekolah dasar. Setelah dewasa, Rodrigo menjalani pendidikannya di Lyceum Universitas Filipina (BA) dan Kolese Hukum San Bada (BL). Rodrigo Duterte memulai karir politiknya sejak 2 Mei 1986-27 November 1987 sebagai Wakil Walikota Davao yang dipimpin oleh Jacinto T. Rubillar. Periode selanjutnya, Rodrigo Duterte

menduduki jawatan Walikota Kota Davao pertama 2 Februari 1988- 19 Maret 1998 menggantikan posisi Jacinto T. Rubillar yang menjabat sebelumnya.

Pada tahun yang sama, Presiden Ferdinand Marcos digulingkan dalam "*People Power Revolution*", karena menyebabkan peningkatan kejahatan yang sangat merajalela di Davao City. Terpilih sebagai walikota pada 1988, Duterte berusaha menindak segala kegiatan kriminal dengan memberlakukan hukum jam malam dan minum-minuman alkohol yang ketat. Selain itu, ia mengizinkan tindakan main hakim sendiri "*Death Squad*" juga disebut sebagai "*Davao Death Squad*" dan "*Duterte Death Squad*"-yang dilaporkan menewaskan lebih dari 1.000 tersangka pengedar narkoba dan anggota geng selama 20 tahun kepemimpinannya. Berdasarkan dari apa yang Duterte perjuangkan, Dia dijuluki "*The Punisher*" karena caranya yang kontroversial, akan tetapi Duterte tetap berhasil dalam mengurangi kejahatan di Davao City (<https://www.biography.com/political-figure/rodrigo-duterte> diakses pada 23 April 2019).

Setelah Duterte lengser diganti oleh Benjamin C. de Guzman. Setelahnya Benjamin C. de Guzman berakhir, kursi Walikota Kota Davao kembali diduduki oleh Rodrigo Duterte sejak 30 Juni 2001 sampai 30 Juni 2010 dan yang menjadi Wakil Walikota adalah Sara Duterte. Periode selanjutnya, 30 Juni 2010 sampai 30 Juni 2013 dijabat oleh Sara Duterte dan Rodrigo Duterte sebagai Wakil Walikota. Setelah satu masa jabatan Sara Duterte selesai, Rodrigo Duterte kembali menjadi Walikota sejak 30 Juni 2013.

Setelah 7 periode menjadi seorang pejabat Kota Davao, tepatnya pada 21 November 2015, Duterte mendeklarasikan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Filipina dalam pemilihan Presiden 2016. Mayoritas rakyat Filipina

mempercayakan Rodrigo sebagai calon presiden terkuat karena beberapa hal. Salah satunya adalah janji Rodrigo yang mampu meyakinkan rakyat Filipina bahwa dirinya akan melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Bahkan Rodrigo berjanji, tidak hanya dalam keadaan menjalankan tugas, janji itu akan ia laksanakan, dalam keadaan tidur sekalipun.

Pelaksanaan pemilihan Presiden Filipina, Senin, 9 Mei 2016, dengan lima kandidat calon Presiden Filipina diantaranya Rodrigo Duterte, Manuel Roxas, Grace Poe, Miriam Santiago dan Jejomar Binay. Dengan rival terberatnya adalah Mar Roxas.

Sebuah lembaga survey yang berfungsi memonitori berlangsungnya pemilihan Presiden, Duterte mendapatkan suara yang jauh lebih banyak dari rival terdekatnya, yaitu Mar Roxas. Survey ini berdasarkan dari Lembaga PPCRV yang sudah diakreditasi oleh pemerintah Filipina sehingga dapat dibenarkan keakuratan datanya. Keunggulan Rodrigo berdasarkan pada sejarah gerakan politiknya di Kota Davao sejak tahun 1988. Rodrigo sebagai Walikota Kota Davao dikenal sebagai sosok yang blak-blakan, cenderung kasar, dan kontroversial. Kontroversi dalam diri Rodrigo yakni ucapan-ucapan dan tindakannya sebagai Walikota yang mengundang perhatian banyak pihak (<https://nusantaranews.co/biografi-politisi-kontroversial-rodrigo-duterte/> diakses pada 23 April 2019).

Pada tanggal 30 Juni 2016 bertempat di Istana Kepresidenan Malacanang, Rodrigo Duterte dilantik menjadi seorang Presiden. Dalam pidato pelantikannya Duterte bertekad untuk membersihkan Filipina dari para penjahat dalam enam bulan pertama dari masa jabatannya. Duterte akan bertindak memerangi kejahatan ini dengan caranya yang mungkin segelintir orang akan tidak setuju dengan

caranya. Perang melawan kejahatan ini pun akan dipertahankan dan tanpa henti untuk politik nasionalnya (<https://www.voaindonesia.com/a/perang-terhadap-narkoba-di-filipina-picu-kecaman-meluas/3476117.html> diakses 4 April 2019)

Filipina merupakan negara yang giat terhadap perdamaian dunia, selalu terlibat di dalam forum-forum atau organisasi dunia. Seperti ASEAN, PBB, dan juga terlibat meratifikasi Statuta Roma di Mahkamah Pidana International atau *International Criminal Court* (ICC). Keterlibatan Filipina diberbagai Organisasi dinilai baik terlebih saat memutuskan untuk menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma dan bergabung di ICC.

Sebelumnya usaha untuk meratifikasi belum teraktualisasikan hanya saja pada masa Presiden Joseph Estrada tepatnya pada tanggal 28 Desember 2000, Filipina menandatangani statuta roma tanpa meratifikasikannya. Lalu pada masa Presiden Gloria Macapagal Arroyo, pada masa pemerintahan ini Arroyo menolak untuk melanjutkan statuta ini untuk diratifikasi. Disamping itu, Senator Miriam Defensor Santiago pada tahun 2008 mendesak presiden Arroyo untuk menilik rancangan statuta roma dan meneruskan untuk persetujuan ratifikasi. Akan tetapi hasil tetapi hasilnya tetapi nihil. Kendati pada tahun 2010 saat terpilihnya Presiden Benigno Aquino III, Santiago kembali mengangkat perihal isu ini untuk mendapat persetujuan penurusan untuk ratifikasi statuta Roma ini. Barulah pada tanggal 28 february 2011, Benigno menandatangani statuta dan mengirimkan ini untuk persetujuannya. Dan terdaftar pada tanggal 23 Agustus 2011 telah meratifikasi statua Roma.

Resminya pada 30 Agustus 2011 bertempat di *United Nations Office of Legal Affairs* in New York, Pemerintah Republik Filipina diwakili oleh Senator Loren Legarda yang merupakan Presiden pada Komite urusan Luar Negeri

meratifikasi Perjanjian Roma dari Mahkamah Pidana Internasional dan menjadi Negara ke 117 yang meratifikasi perjanjian ini. Akan tetapi, pengadopsian statuta roma ini hanya berfungsi di Filipina setelah 1 November 2011.

ICC Presiden Sang-Hyun Song, mengunjungi Filipina dan negara Asia Tenggara lain dalam Maret untuk memfasilitasi informasi konsultasi mengenai pengesahan Statuta Roma, mengapresiasi dari keputusan Filipina. Berbicara dari kursi pengadilan di Den Haag, Dia menyatakan: "undang-undang ini adalah indikasi lain dari berkembangnya peranan Asia dalam upaya masyarakat internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan yang paling serius membangkitkan keprihatinan untuk kemanusiaan. Saya mengucapkan dengan selamat kepada semua orang-orang di Filipina yang bekerja keras dalam komitmennya untuk menjadikan Filipina seperti sekarang, dan saya berharap bahwa keputusan bersejarah ini akan membuahkan hasil untuk menghilangkan sesuatu yang tak berdasar dengan bergabung ke ICC antara negara-negara Asia lainnya" (https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/press%20releases/press%20releases%202011/Pages/pr717.aspx diakses pada 19 Maret 2019).

Filipina meratifikasi Statuta Roma ini pada masa pemerintahan Benigno Aquino III yang merupakan seorang reformis pemberani yang mendukung Amerika Serikat, dan menempatkan diri di bawah yuridiksi ICC yang berbasis di Den Haag.

Melihat dari Negara Republik Filipina yang memutuskan untuk menjadi bagian dari pro-statuta Roma yang dipayungi oleh ICC. ICC sendiri yang merupakan singkatan dari *International Criminal Court* atau Mahkamah Pidana Internasional, mulai berfungsi sejak 1 Juli 2002, akan tetapi sudah diresmikan dengan mengadopsi Statuta Roma sejak 17 Juli 1998. ICC, di bawah Statuta

Roma, adalah sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki dan apabila diperlukan, mengadili pihak-pihak yang dianggap melakukan kejahatan berat yang tergolong berdasarkan empat kategori, yaitu: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi (*International Criminal Court*). Terdapat sekitar 123 negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, yang dimana juga merupakan anggota dari ICC.

Berdasarkan Statuta Roma, ICC akan diperbolehkan untuk turun tangan dalam masalah sebuah negara apabila pihak berwenang tidak bisa atau tidak mau mengambil tindakan. Namun, karena tidak memiliki satuan polisi sendiri, ICC harus mengandalkan sumber daya setempat dalam menangkap maupun membawa tersangka ke pengadilan di Den Haag . Berdasarkan pasal 12 Statuta Roma, saat sebuah negara meratifikasi Statuta Roma, maka negara yang telah berkomitmen dalam meratifikasi artinya menyetujui bahwa ia adalah bagian dari yurisdiksi ICC atas semua kejahatan yang termasuk dalam lingkupnya (<http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf> diakses pada 4 April 2019). Sejak pendiriannya secara resmi pada tahun 2002, Mahkamah pidana internasional telah mendapat 34 pengajuan dakwaan dari delapan negara-negara Afrika untuk permasalahan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida (https://opinion.inquirer.net/112261/the-philippines-in-the-icc?utm_expid=.XqNwTug2W6nwDVUSgFJXed.1 diakses pada 19 Maret 2019).

Presiden Rodrigo Duterte berumur 71 tahun saat menjabat sebagai Presiden ke-16 dan didampingi oleh Leni Robredo sebagai Wakil Presidennya. Ia pun menginginkan kehidupan sederhana dan mengecam kehidupan mewah yang

dikaitkan dengan jabatan, dan pelantikannya pun berlangsung secara sederhana. Duterte berjanji memperbaiki infrastruktur, menciptakan lapangan kerja dan menyatakan diri untuk membuat warga Filipina mendapatkan kesejahteraan secara merata. Keinginan terbesarnya jelas untuk memberantas kriminal di Filipina, seperti narkoba dan pelanggaran hukum. Program memberantas ini sering disebut dengan program anti-kriminal, program ini termasuk rencana aktivasi kembali pemberlakuan hukuman mati, memberikan izin kepolisian dan tentara untuk menembak mati pelaku kejahatan, serta menawarkan imbalan untuk setiap mayat pengedar narkoba. Duterte juga selalu dikaitkan dengan 'tim kematian' pada tahun 1998 yang menewaskan 1.400 orang yang sebagian besar pengedar narkoba, akan tetapi Duterte menyatakan dengan membantah dirinya terkait dengan tim itu kematian itu (<https://www.dw.com/id/duterte-terjunksan-militer-dalam-perang-narkoba/a-37378014> diakses 4 April 2019).

Janji atau program Duterte mengenai pemberantasan Narkoba ini telah menjadi prioritas Duterte. Program ini menjadi pro-kontra di Filipina sendiri ataupun masyarakat internasional. Menilik dari program ini, kembali ke Filipina pada masa dimana didudukinya Filipina oleh Kerajaan Spanyol pada sekitar tahun 1521 dan 1631, saat itu suku Moro yang berada di Mindanao mengkonsumsi opium untuk memberikan efek yang sehingga tidak sadarkan diri, gunanya untuk membunuh kapten Spanyol yang menjajah Filipina. Juga, opium ini digunakan untuk menghilangkan kesadaran disaat tertangkap dan para penjajah membutuhkan informasi dan pastinya menyiksa, dan saat itu guna opium untuk menghilangkan rasa sakit saat disiksa. Setelah itu, Spanyol mengetahui bahwasanya warga Filipina menggunakan opium dan setelah itu Spanyol melarang

penggunaan opium, dan bilamana warga Filipina diketahui menggunakan opium akan dikenakan hukuman mati.

Setelah lepas dari penjajahan Spanyol, Amerika dan Jepang. Penggunaan Narkoba di Filipina semakin marak dengan berbagai penggunaannya. Ini dikarenakan saat setelah lepas dari penjajahan, Pemerintahan saat itu belum mendapatkan penanganan serius. Lalu, pada masa paska-kemerdekaan dan presiden pun terus berupaya menangani penyalahgunaan narkoba dan menetapkan hukuman mati dan belum sepenuhnya berhasil dalam menangani kasus tersebut.

Pada masa Rodrigo Duterte juga 'peperangan' untuk memberantas para narkoba dengan cara memberlakukan kembali pasal *Republic Act* 9145 yang berisikan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati serta denda senilai 50.000 peso sampai 10.000.000 peso. Jenis-jenis narkoba yang dilarang seperti: Opium, Heroin, Morfin, Ganja, dan lain sebagainya beserta turunan dan jenis baru narkoba. Namun dalam penanganan Narkoba bersamaan pihak kepolisian serta warga sipil yang terjadi adalah sejumlah pelaku tersebut tetap dibunuh meskipun telah menyerahkan dirinya untuk ditangkap serta memohon agar dibiarkan hidup saat polisi mendatangi rumah mereka yang mengatasnamakan satuan anti-Narkoba. Banyak diantaranya korban yang tidak terkait kasus Narkoba sama sekali yang turut menjadi korban. Hal tersebut dikarenakan Duterte memberikan imbalan kepada Setiap 1 orang yang terbunuh, maka polisi tersebut mendapatkan bayaran sebesar US\$300 oleh atasannya dan tidak ada insentif bagi penangkapan yang kemudian dibawa pada peradilan yang seharusnya dilakukan. Daftar pengguna Narkoba yang dimiliki oleh pihak

kepolisian didapatkan hanya berdasarkan asumsi masyarakat yang belum terbukti kebenaran berdasarkan data atau barang bukti.

Namun terdapat juga beberapa kasus dimana warga sipil yang membunuh seseorang dengan motif lain, akan tetapi kematiannya dirancang atau dimanfaatkan seolah-olah orang yang dibunuh tersebut merupakan pengguna Narkoba. Hal tersebut dilakukan agar motif pembunuhannya tidak dicurigai oleh pihak kepolisian sebagai suatu kasus pembunuhan diluar operasi pemberantasan Narkoba (Sarlina, <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2613> diakses pada 20 maret 2019).

Setelah setahun berlalu, operasi anti-narkoba yang diluncurkan oleh Filipina memakan banyak korban dari ketegasan seorang Duterte. Terbukti kurang lebih sekitar 5.000 jiwa tewas dengan di tembak mati di tempat saat penangkapan. Selama meluncurkan program ini jelas menuai pro-kontra dari belahan dunia dan masyarakat internasional maupun badan-badan internasional, termasuk dari ICC.

Protes atau Pro dan Kontra dari aksi pemberantasan narkoba ini tidak hanya direspon oleh masyarakat internasional akan tetapi protes dilayangkan dari seorang jaksa dalam negeri di Filipina itu sendiri. Dilansir dari situs GMA News Online, seorang jaksa yang bernama Jude Sabio melaporkan aksi dari pemberantasan narkoba yang di lakukan oleh otoritas setempat filipina kepada para pengedar dan pecandu narkoba, laporan ini dilayangkan pada tanggal 24 April 2017. Jude menganggap bahwasanya Presiden Duterte telah melakukan kejahatan kemanusiaan secara terus menerus.

Situasi semakin memanas antara Filipina dan ICC, tepatnya pada Februari 2018, seorang jaksa penuntut pada ICC mulai mengumpulkan bahan dan

keterangan terkait dugaan terhadap Duterte terhadap kebijakannya dalam memberantas narkoba di wilayah Filipina yang dinilai Duterte telah menyebar luas dan berbahaya (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161117164948-106-173372/dinilai-tak-berguna-filipina-pertimbangkan-keluar-dari-icc?> Diakses 4 April 2019).

Kontradiksi berjalan antara Duterte beserta pemerintahan Filipina dengan ICC, mengenai data-data yang konkrit. Setelah ICC memutuskan untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap kemanusiaan ini, Rodrigo Duterte memutuskan untuk keluar dari ICC, Duterte mengatakan tidak peduli dengan apa yang ICC layangkan dugaan terhadap Filipina. Lalu, Duterte juga akan terus melanjutkan kebijakan perang melawan narkoba ini dengan dalih melindungi negara dan kepentingan nasionalnya. Duterte juga menyatakan bahwa sejak awal Filipina meratifikasi ICC tidak pernah berpihak terhadap negaranya. Selain itu Duterte menyatakan bahwasanya Hukum Internasional tidak bisa atau tidak boleh mentumpang tindihkan hukum di negara itu sendiri karena setiap negara memiliki kepentingan nasional (<https://internasional.kompas.com/read/2018/03/14/16022631/duterte-umumkan-filipina-keluar-dari-mahkamah-kriminal-internasional> diakses pada 20 maret 2019).

Filipina mengumumkan keluar dari ICC pada tanggal 14 Maret 2018, keputusan ini jelas membuat masyarakat internasional terkejut. Pengumuman ini langsung dinyatakan oleh Presiden Duterte sendiri yang menyatakan akan secepatnya keluar dari ratifikasi statuta roma ini. Akan tetapi meski Duterte

menyatakan secepatnya, pada kenyataannya Filipina tidak keluar begitu saja. Ada proses-proses panjang yang harus dilalui (<https://internasional.kompas.com/read/2018/03/14/16022631/duterte-umumkan-filipina-keluar-dari-mahkamah-kriminal-internasional> diakses pada 20 maret 2019).

Kritikan tajam bertubi-tubi dari masyarakat internasional, akan tetapi Rodrigo Duterte tidak memperdulikan repon dari masyarakat internasional. Duterte hanya ingin menyelamatkan negaranya dengan cara persepsinya sendiri sebagai Presiden.

Peneliti memilih judul ini untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh idiosinkratik dari Rodrigo Duterte dalam kebijakan keluarnya Filipina dari ICC, yang menjadi perhatian dunia. Dan uraian diatas menjadi pendorong untuk peneliti untuk mengkajinya lebih dalam dan mengembangkan wawasan studi Hubungan Internasional.

Dari penelitian yang dibuat oleh Arga Andreas dari Universitas Komputer Indonesia Tahun 2018 tentang *“Idiosyncratic Presiden Hugo Chavez Dalam Kebijakan Luar Negeri Venezuela Terhadap Amerika Serikat (2002-2013)”*. Penulis menemukan kesamaan dalam meneliti suatu faktor idiosinkratik dari masing-masing pemimpin yang dan kesamaan lainnya merupakan salah satu pemimpin yang mempunyai perbedaan dengan sebelumnya dengan Pemimpin yang berani. Perbedaannya, peneliti meneliti Presiden dari Filipina yaitu Rodrigo Duterte, akan tetapi peneliti diatas meneliti idiosinkratik dari Hugo Chavez saat menjadi Presiden Venezuela. Dan juga kedua presiden ini memiliki persepsi elit yang bisa membuat arah kebijakan kedua negara yang berdasar dari persepsi mereka.

Dari penelitian yang dibuat oleh Kriesna Adi P dari Universitas Komputer Indonesia tentang “*Pengaruh Idiosyncratic Mahmoud Ahmadinejad terhadap Hubungan Luar Negeri Iran-Amerika Serikat (2005-2008)*“. Peneliti menemukan kesamaan dengan meneliti perihal idiosinkratik masing-masing dari pemimpin negara. Hanya saja perbedaannya peneliti meneliti idiosinkratik dari Presiden dari Filipina yaitu Rodrigo Duterte, akan tetapi peneliti diatas meneliti pengaruh *Idiosyncratic* Mahmoud Ahmadinejad Presiden dari Iran.

Dari penelitian yang dibuat oleh M. Bayu Saputra dari Universitas Komputer Indonesia tentang “*Faktor Idiosyncratic Raul Castro Dalam Perubahan Hubungan Luar Negeri Kuba-Amerika Serikat (2009-2015)*“. Perbedaannya adalah peneliti meneliti idiosinkratik Presiden Filipina yaitu Rodrigo Duterte, Peneliti diatas meneliti faktor idiosinkratik Raul Castro berasal dari Kuba. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian dari M. Bayu Saputra adalah kedua pemimpin ini merubah hubungan luar negerinya.

Latar belakang penelitian inilah yang mendorong peneliti mengajukan penelitian yang berjudul:

“Faktor Idiosinkratik Rodrigo Duterte dalam Kebijakan Keluarnya Filipina dari *International Criminal Court (ICC)*“.

Penelitian ini berdasarkan pada beberapa mata kuliah dalam kurikulum Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia yaitu:

1. Analisa Politik Luar Negeri, Mata kuliah ini membantu peneliti untuk menganalisa arah politik luar negeri yang dilakukan Filipina, bagaimana peran dari seorang Presiden atau seseorang yang memiliki *power* bisa mempengaruhi arah kebijakan luar negeri.

2. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, mata kuliah ini berisikan bagaimana hubungan antar bangsa di Asia Tenggara. Kanada yang terletak di lingkup Benua Asia tepatnya yaitu di Asia Tenggara. Mata kuliah ini membantu penulis untuk mendapat substansi mengenai kebijakan luar negeri Filipina sekarang dan masa lampau.
3. Hukum Internasional, Mata Kuliah ini berisi tentang Fungsi, Kedudukan, Syarat Ketentuan, dan juga yang lainnya dari Hukum Internasional. Dalam mempelajari mata kuliah ini, peneliti sangat terbantu dalam menyusun fenomena yang diangkat. Mata kuliah ini membantu peneliti dalam mendapat substansi yang terkait dengan fungsi dan kedudukan ICC sebagai pelaksana mandat Hukum Internasional, dan bagaimana Hukum Internasional dengan Hukum Nasional akan berhubungan.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah utama dari penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana Faktor Idiosinkratik Rodrigo Duterte dalam

Kebijakan Keluarnya Filipina dari *International Criminal Court (ICC)*“.

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Faktor Idiosinkratik apa yang mendorong Rodrigo Duterte untuk memutuskan keluarnya Filipina dari ICC ?
2. Bagaimana Respon ICC terhadap kebijakan Filipina yang memutuskan untuk keluar?
3. Bagaimana pandangan Warga Negara Filipina terhadap kebijakannya keluar dari ICC?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan yang penulis telah uraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis membatasi masalah dengan kurun waktu 2017-2019 untuk meneliti Idiosinkratik Rodrigo Duterte dari kebijakan

Filipina dalam keluarnya dari ICC. Pembatasan masalah diteliti hanya 3 tahun saja mengingat pada tahun 2017 adalah dimulainya pengaduan kejahatan kemanusiaan seorang Duterte dengan kebijakan *War on Drugs*, tuntutan itu berasal dari seorang jaksa kepada ICC yang kontra terhadap kebijakan Duterte, Ia menginginkan ICC untuk mengusut dan menyelidiki aksi dari kebijakan Filipina ini dan menyelidiki Presiden Rodrigo Duterte karena aktor dari perumusan kebijakan ini.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Idiosinkratik Rodrigo Duterte dalam kebijakan Filipina yang memutuskan keluar dari ICC pada tahun 2017-2019.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Idiosinkratik Rodrigo Duterte dalam kebijakan Filipina yang memutuskan keluar dari ICC
2. Untuk menggambarkan respon dari ICC mengenai kebijakan Filipina keluar dari ICC.
3. Untuk menggambarkan pandangan warga negara Filipina mengenai kebijakannya keluar dari ICC.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitiannya, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan, dan pemahaman perihal Idiosinkratik seorang pemimpin negara, yang membentuk/merubah sebuah kebijakan negaranya terhadap masyarakat internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu menambah wawasan kepada penstudi HI yang tertarik terhadap Idiosinkratik seorang pemimpin. Khususnya untuk pengaruh idiosinkratik pemimpin negara terhadap kebijakan negaranya itu sendiri.